

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekertariat Daerah Kabupaten Malaka adalah :

1. Dari segi lingkungan pengendalian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekertariat Daerah Kabupaten Malaka, masih terdapat kelemahan yaitu pada saat pembagian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai, seringkali para pegawai tidak menjalankan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya dan Kepala instansi belum memperhatikan latar belakang pendidikan dari pegawai tersebut sehingga terjadi penyalagunaan kas oleh bendahara pengeluaran yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan dari bendahara pengeluaran.
2. Dari segi Penilaian Resiko, pada Bagian Perekonomian sudah dibuatkan buku Renstra yang memuat tantangan, peluang dan isu-isu strategis tugas dan fungsi dengan baik tetapi pada prakteknya apa yang sudah disusun dalam buku Renstra masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh pegawai Bagian Perekonomian.
3. Dari segi kegiatan pengendalian masih sangat lemah hal ini ditandai dengan Bendahara tidak melakukan pencatatan secara berkala setiap bukti pengeluaran secara manual, hanya melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan saja, sehingga terjadi

penyalahgunaan/pengeluaran yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dianggarkan dan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA). Bendahara tidak taat dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban tiap bulan hal ini disebabkan karena Bendahara belum memahami dengan baik bagaimana membuat laporan keuangan serta Bendahara tidak menguasai rencana kerja dan penggunaan dana.

4. Dari segi Informasi dan komunikasi, Bagian Perekonomian ini belum ada sarana komunikasi yang bisa memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang keuangan, hanya dalam bentuk DPA-SKPD dan laporan keuangan lainnya yang dapat diketahui oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masih sering terjadi miss komunikasi antara Kepala Bagian dan staf.
5. Dari segi pemantauan Untuk pemantauan berkelanjutan dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya belum dilaksanakan karena kurangnya komunikasi antara Kepala Bagian dan Staf yang ada pada SKPD tetapi untuk evaluasi sudah dilakukan oleh Bagian Perekonomian setiap akhir bulan.

6.2 Saran

1. Untuk lingkungan pengendalian, disarankan kepada Kepala Bagian Perekonomian untuk melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan memperhatikan latar belakang pendidikan atau keahlian

pegawai tersebut, terlebih untuk bendahara seharusnya tenaga akuntansi yang berada pada posisi itu.

2. Untuk penilaian resiko, perlu adanya ketegasan dan pengawasan dari kepala instansi untuk pegawai dalam hal melaksanakan apa yang sudah dibuat dalam Renstra.
3. Untuk kegiatan Pengendalian, Perlu diberikan pelatihan bagi para bendahara mengenai tata cara pengelolaan dan pengeluaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang sudah ditetapkan dan Bagian Perekonomian perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang kompeten serta pembentukan unit khusus dan dokumentasi yang baik sehingga tidak terjadi penyalagunaan kas yang ada pada SKPD tersebut.
4. Untuk Informasi dan komunikasi, Bagian Perekonomian perlu meningkatkan sarana komunikasi sehingga penyampaian informasi kepada para pegawai dapat terlaksana.
5. Untuk Pemantauan atau pengawasan, Kepala Bagian Perekonomian perlu melakukan pemantauan yang teratur sistematis guna penyempurnaan sistem pengendalian internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, 2005. Zaki. *Sistem Akuntansi, Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Gaol, Jimmy. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Grasindo, Jakarta.
- Hartadi, 2005. Bambang. *Sistem Pengendalian Intern Kas dalam Hubungan dengan Manajemen* Edisi III. Yogyakarta :BPFE UGM.
- Hurt, Robert L.2013. *Accounting Information System*. Third edition. Mcgraw-Hill, New York.
- Jusup,Haryono.2001. *Dasar- Dasar Akuntansi*. Bagian Penerbit STIE YKPN: Yogyakarta.
- Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- _____,Keputusan Bupati Malaka Nomor 3/HK/2017. tentang *Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa pengguna Anggaran/Barang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka*.
- Lalamentik, 2012. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Kas Untuk Mencegah Penyelewengan Dana Pada Dinas Pendapatan Kota Manado*. Skripsi (tidak dipublikasikan).Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi.Manado.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi, (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press, Yogyakarta.
- Norma Pemeriksaan Akuntansi,*Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)*, Bagian Penerbit Rineka Cipta,1990.
- Ratmono dan Sholihin, 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Riandari, 2013. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas di Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Skripsi (tidak dipublikasikan).Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang <http://eprints.undip.ac.id/39369/1/Riandari.pdf> tanggal akses 23 Maret 2018.

Rudianto. 2009. *Penganggaran*. Yogyakarta: Erlangga.

_____, Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.

_____, Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang *Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya*. Jakarta.

_____, Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

_____, Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

_____, Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara*. Jakarta.

_____, Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

_____, Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

_____, Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2016 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.

_____, Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

_____, Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 tentang *Perbendaharaan*

SR, Soemarso. 1990. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi 4. Jakarta: Rineka Cipta.

Sitorus, Victor. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP. Bogor.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.

Wowor, 2015 *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA, Vol.3 No.1 Maret 2015.